

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun yang dicanangkan sejak 2 Mei 1994 merupakan usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas serta mempermudah akses pendidikan di Indonesia. Program wajib belajar 9 tahun ini tercapai dengan menciptakan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada tahun 2005. Seiring berjalannya waktu, mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan, dan orientasi-program BOS. Program BOS bukan hanya berperan untuk mempertahankan jumlah peserta didik saja, namun juga harus berkontribusi dalam peningkatan mutu pendidikan dasar. Selain itu kenaikan jumlah Dana BOS yang signifikan mulai tahun 2009 diharapkan akan menjadikan BOS sebagai pilar utama mewujudkan pendidikan dasar tanpa dipungut biaya.

Program wajib belajar 9 tahun tersebut berhasil meningkatkan angka partisipasi kasar dalam pendidikan tingkat dasar. Tuntasnya program wajib belajar 9 tahun ini antara lain diukur melalui tambahnya jumlah gedung dan ruang kelas baru di dekat masyarakat yang banyak memiliki anak-anak wajib belajar (usia 7-15 tahun), memperluas jangkauan SMP terbuka dan menambah tempat kegiatan belajar (TKB) dan kejar paket B, serta meningkatnya peran dan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan wajib belajar. Keberhasilan program wajib belajar 9 tahun menjadikan lulusan SMP semakin meningkat, sehingga

pemerintah menambah daya tampung layanan pendidikan menengah (SMA dan SMK) untuk menampung para siswa memperoleh jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah meluncurkan kebijakan Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang implementasinya difokuskan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat. Tujuan utama program tersebut adalah anggota masyarakat yang secara ekonomi tidak mampu memenuhi biaya operasional sekolah, juga memberikan layanan pendidikan terjangkau dan bermutu terutama bagi siswa miskin.

Rencana Strategis Kemendikbud 2010-2014 (2013:3) menjabarkan bahwa implementasi PMU difokuskan pada peningkatan layanan peserta didik dengan pemberian Bantuan Operasional Sekolah Menengah (BOS SMA), penyediaan daya tampung pendidikan menengah melalui pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), Ruang Kelas Baru (RKB) dan rehabilitasi gedung sekolah. penyediaan dan peningkatan kualitas guru melalui peningkatan kerjasama dengan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) atau Perguruan Tinggi (PT) dalam penyediaan guru produktif dan pengusulan pengangkatan guru sekolah menengah; peningkatan kualitas pembelajaran melalui implementasi kurikulum 2013 yaitu dengan meningkatkan kompetensi *soft skill* dan *hard skill* pesertadidik. Pemerintah secara umum memberikan Dana BOS SMA untuk mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat.

Adanya bantuan yang diberikan pemerintah supaya sekolah membebaskan biaya pendidikan ataupun meringankan tagihan biaya sekolah, dan juga supaya

kualitas proses pembelajaran di sekolah akan menjadi semakin meningkat. Besaran Dana Tahun 2018 yang diterima tiap sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa per sekolah dan satuan Dana BOS SMA.

Waktu penyaluran Dana BOS SMA ini diberikan ke sekolah pertriwulan, Pengelolaan Dana BOS wajib berpedoman pada petunjuk teknis BOS SMA yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan SMA, sebagai teknis yang bertanggung jawab dalam Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana BOS SMA. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan program BOS adalah Pengelolaan Dana dan segala sumberdaya yang ada dalam program BOS.

Pentingnya Pengelolaan Dana BOS SMA yaitu, dengan Pengelolaan yang baik akan mampu membantu ketercapaian tujuan dari program BOS SMA dengan efektif dan efisien. Sekolah menempati posisi penting dalam penentuan penggunaan Dana BOS SMA, karena sekolah merupakan instansi yang terkait langsung Pengelolaan Dana BOS. Kesalah pemahaman oleh pengelola dapat menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan Pengelolaan Dana BOS SMA. Kurang spesifiknya petunjuk yang ada dalam petunjuk teknis BOS SMA menimbulkan penerjemahan yang berbeda-beda oleh pihak Pengelola Dana BOS SMA. Hal ini menjadi permasalahan dan dapat menimbulkan dugaan penyelewengan.

Hasil observasi yang dilakukan melalui wawancara kepada Kepala Sekolah, Bendahara BOS dan Komite Sekolah SMA Negeri 1 Jepara, diperoleh informasi terkait Dana BOS SMA. Pengelolaan Dana BOS SMA di SMA Negeri 1 Jepara diawali dengan pembuatan Rencana Penggunaan Dana (RPD) BOS SMA yang disusun oleh Kepala Sekolah dan Bendahara BOS SMA Negeri 1

Jepara. Rancangan tersebut kemudian diajukan dan disetujui Dinas Pendidikan Provinsi Semarang.

Pencairan Dana BOS di SMA Negeri 1 Jepara ini, terdiri dari empat tahap penyaluran yaitu per triwulan. Penyaluran pertama untuk Triwulan I periode Januari-Maret. Penyaluran kedua untuk Triwulan II periode April-Juni. Penyaluran ketiga untuk Triwulan III periode Juli-September. Dan Penyaluran keempat untuk Triwulan IV periode Oktober-Desember. Yaitu sebesar Rp. 1.400.000,00 per siswa/tahun. Narasumber juga menyebutkan jumlah peserta didik SMA Negeri 1 Jepara pada tahun ajaran 2018/2019 sebanyak 1190 peserta didik.

Pelaksanaan Pengelolaan Dana BOS SMA di SMA Negeri 1 Jepara tahun 2018, terdapat hambatan yang terjadi. Rencana Penggunaan Dana (RPD) BOS SMA yang telah disusun Bendahara BOS untuk dimintai tindak lanjut kepada Dinas Pusat, terjadi perubahan aturan mengenai penggunaan Dana BOS SMA. Hal tersebut menjadikan sekolah melakukan penyusunan RPD BOS perubahan dengan disesuaikan pada penggunaan Dana yang terdapat di petunjuk teknis BOS SMA yang baru. Penyusunan perubahan RPD BOS SMA ini, menjadikan penyaluran Dana BOS SMA ke sekolah terlambat.

Publikasi yang dilakukan SMA Negeri 1 Jepara terkait Pengelolaan Dana BOS SMA dapat dikatakan berlangsung cukup baik. Kepala Sekolah di Awal tahun pelajaran diselenggarakan Rapat Pleno Komite Sekolah, yang diikuti oleh Komite Sekolah, orang tua/wali siswa dan diikuti oleh Kepala Sekolah beserta guru. Pelaksanaan rapat untuk mensosialisasikan rencana anggaran terkait RKAS dan RPD BOS SMA pada tahun anggaran selanjutnya dan mempublikasikan hasil

Pengelolaan Dana BOS SMA yang telah terlaksana kepada orang tua/walasiswa.

Melihat pentingnya pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam penyelenggaraan pendidikan dan berbagai masalah yang melingkupinya, menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (BOS) di SMA Negeri 1 Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah Tahun 2018”. Tujuannya untuk mengetahui secara riil Pengelolaan Dana BOS SMA tahun 2018 mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi, serta Pelaporan.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut peneliti membatasi permasalahan yang akan dilakukan penelitian, yaitu mengenai Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 1 Jepara yang diuraikan dalam hal Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi serta Pelaporan.

1.3 Perumusan Masalah

- a. Bagaimana Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 1 Jepara Tahun 2018 dalam hal Perencanaan?
- b. Bagaimana Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 1 Jepara Tahun 2018 dalam hal Pelaksanaan?
- c. Bagaimana Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 1 Jepara Tahun 2018 dalam hal Pengawasan?
- d. Bagaimana Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 1 Jepara Tahun 2018 dalam hal Evaluasi?

- e. Bagaimana Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 1 Jepara Tahun 2018 dalam hal Pelaporan?
- f. Bagaimana Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam hal Perbandingan Pelaksanaan Evaluasi Realisasi Dana BOS Dengan Juknis di SMA Negeri 1 Jepara Tahun 2018?

1.4 Tujuan Penelitian

- a. Perencanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (BOS) di SMA Negeri 1 Jepara.
- b. Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (BOS) di SMA Negeri 1 Jepara.
- c. Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (BOS) di SMA Negeri 1 Jepara.
- d. Evaluasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (BOS) di SMA Negeri 1 Jepara.
- e. Pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (BOS) di SMA Negeri 1 Jepara.
- f. Perbandingan Pelaksanaan Evaluasi Realisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (BOS) Dengan Juknis di SMA Negeri 1 Jepara.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya mengenai pengelolaan dana BOS.

2. Secara Praktis

- a) Bagi Peneliti Diharapkan untuk lebih mengetahui secara mendalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (BOS), serta penerapan disiplin ilmu yang diperoleh di bangku kuliah.
- b) Bagi Pemerintah : Memberikan masukan untuk peningkatan kualitas pengawasan pengelolaan dan buku panduan pelaksanaan Pengelolaan Dana BOS SMA.
- c) Bagi pihak sekolah penerima Dana BOS SMA: Diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan dan lebih transparan dalam Pengelolaan Dana BOS SMA.
- d) Bagi Komite Sekolah Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai peran Komite Sekolah dalam Pengelolaan Dana BOS SMA.
- e) Bagi Orang Tua Siswa dan Masyarakat Memberikan pengetahuan agar masyarakat mampu menganalisis apakah Pengelolaan Dana BOS SMA sudah wajar atau tidak.